

## **Lampiran II : Hasil Wawancara**

### *Wawancara pertama*

Informan : Bapak Sukamto, aktivis zakat, selaku dewan penasihat senior di  
BAZNAS Kota Madiun

Waktu : Kamis 18 Oktober 2018, pukul 08.30 – 10.00 WIB

Tempat : Kantor kordinasi BAZNAS Kota Madiun, dalam lingkup kator  
Walikota Madiun

1. Sehubungan dengan penelitian saya di BAZNAS, bagaimana awal mula berdirinya BAZNAS Kota Madiun Pak?

Jawaban:

Jadi awalnya dulu namanya bukan BAZNAS mbak, tapi gini ceritanya. Dulu kita mengelola zakat secara insidental hanya pada saat bulan Ramadhan saja. Kemudian tahun 1994 kita melakukan study banding ke Jakarta, baru setelah itu didirikan BAZIS di Kota Madiun. Setelah itu keluar aturan UU no 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZIS pada tahun 2001 berubah nama menjadi BAZ Kota Madiun. Mulai dari tahun 2001 itu BAZ Kota Madiun dibuatkan SK kepengurusan baru yang ditandatangani oleh Walikota Madiun.

Kemudian tahun 2011 ada perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga BAZ Kota Madiun berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Madiun. Ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten/kota se-Indonesia.

Ceritanya awalnya dibentuk BAZ dulu kami masih perlu waktu untuk professional. Bagi kami pengelolaan BAZ sangat sulit karena *nyuwun sewu* loh ya, BAZIS yang dulu penanganannya sangat tradisional banget dan pengorganisasiannya masih banyak kendala di sana sini. Kemudian kita coba untuk kita reduksi. Dari 2006 kita baru betul-betul *sattle* di 2009. Prosesnya itu kemarin transformasinya dari BAZIS ke BAZ itu luar biasa, agak perlu energi. Kalo dari BAZ ke BAZNAS (seperti) tinggal ganti baju aja.

2. Apa saja program kerja BAZNAS Kota Madiun?

Jawab:

Nah ini mbak, silakan saya kasih ini (penulis diberi buku panduan Raker BAZNAS). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga milik pemerintah, BAZNAS Kota Madiun memiliki lima program unggulan pentasyarufan yang merupakan elaborasi dari permasalahan-permasalahan pemerintah kota Madiun. Kelima program itu adalah:

- a. PROGRAM ” MADIUN CERDAS “
- b. PROGRAM ” MADIUN MAKMUR ”
- c. PROGRAM “MADIUN SEHAT”
- d. PROGRAM “MADIUN PEDULI”
- e. PROGRAM “MADIUN TAQWA”

Terus untuk program-program bidang lainnya nanti silakan dilihat di bukunya. Sama data-data lainnya seperti profil, visi, dan misi bisa minta ke temen-temen yang di sini ya.

3. Menurut Bapak bagaimana perkembangan BAZNAS Kota Madiun?

Jawaban:

Menurut saya sudah bagus. Omzet kita saat ini mencapai 2M. Walaupun bukan termasuk yang paling bagus tapi dibanding daerah-daerah lainnya kita sudah termasuk menengah ke atas lah.

4. Bagaimana pengumpulan dana ZIS di Madiun?

Jawaban:

Jadi gini ya. Untuk pengumpulan yang dari (sumber) zakat, itu kita dapat dari birokrasi atau ASN di lingkungan kota Madiun. Tapi zakat yang dibayarkan oleh ASN baru sebatas tunjangan struktural saja, yaitu hanya sekitar 2,5% dari 520.000 rupiah. Dari total sekitar 6000 an pegawai ASN itu hanya sekitar seperempatnya saja (yang membayar zakat penghasilan). Kira-kira kalau semuanya membayar zakat (penghasilan) maka potensinya adalah 25 kali lipat (pengumpulan zakatnya). Ya ini karena kurangnya kesadaran saja ya. Kemudian ada juga zakat dari masyarakat luas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Pengumpulan yang dari infaq dan shadaqah totalnya ada sekitar 75%. Masyarakat luas ini adalah dari relawan (BAZ Kecamatan/Kelurahan) dan juga ada kaleng S-3.

5. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan SDM Pak, bagaimana pengelolaannya apakah sudah efektif?

Jawaban:

Disini yang fulltimer ada 6 pegawai dan ada 1 yang membantu. Kita ini kerjanya mengelola 3 kecamatan dan 27 kelurahan. Dari program kerja yang formal sudah terlaksana secara efektif, sedangkan untuk pengawasannya kita belum. Namun kita melibatkan stakeholder atau kader-kader da'i untuk membantu kami dalam menangani pengelolaan ZIS di daerahnya.

Terus kita merencanakan juga untuk membentuk tim sosialisai yang terdiri dari sekda, wawali, dan sebagainya agar menyerukan gerakan sadar zakat. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah di daerah Trenggalek dan Karanganyar.

Selanjutnya, sehubungan dengan penelitian njenengan yang judulnya tentang Implementasi Pengukuran *Value for Money* di BAZNAS Kota Madiun, disini perlu saya jelaskan sebelumnya. Perlu digarisbawahi bahwa BAZNAS bukan pemerintah daerah. Kemudian capaian input itu berkorelasi dengan capaian program, misalnya: Jika masyarakat malas berzakat, maka input kita sedikit. Dampaknya, program pentasyarufan yang sudah kita rencanakan akan tidak sesuai. Seperti kejadian tahun ini. Awalnya kita sudah merencanakan anggaran dengan sangat matang, dana CSR awalnya kita anggarkan (sebagai pengumpulan) sebesar 200 juta rupiah. Namun ternyata setelah kita ajukan ternyata ada perubahan kebijakan daerah.

*Wawancara kedua*

Informan : Ibu Sholatin, staf bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan  
BAZNAS Kota Madiun

Waktu : Kamis 31 Januari 2019, pukul 11.00 – 12.00 WIB

Tempat : Kantor kordinasi BAZNAS Kota Madiun, dalam lingkup kator  
Walikota Madiun

1. Dari laporan realisasi anggaran 2017 ke 2018 itu saya lihat ada penurunan biaya ya bu?

Jawab:

Oh iya mbak, itu karena tahun 2017 kita belum makai aplikasi SIMBA. Jadi semua pengeluaran untuk operasional langsung kita catatkan di biaya bidang penghimpunan; pendayagunaan; perencanaan, keuangan, dan laporan; serta pengembangan SDM dan Administrasi umum. Terus tahun 2018 kita sudah mulai menggunakan aplikasi SIMBA, yang tadinya biaya tidak ada pembatasan setelah menggunakan aplikasi SIMBA jadi beda. Setiap ada dana yang masuk dari kelompok zakat maka otomatis 1/8 menjadi hak amil. Kemudian kalau ada dana yang masuk dari kelompok Infaq maka otomatis 20% yang masuk dana hak amil.

2. Jadi ini ada kaitannya dengan perbedaan pencatatan pos “Optimalisasi BAZ Kecamatan/Kelurahan” di tahun 2017 dengan 2018 ya bu?

Jawab:

Iya mbak, jadi tahun 2018 pos itu masuk di bidang pendistribusian program Madiun Taqwa. Seperti halnya biaya cetak kalender dan buku panduan ZIS, di tahun 2018 ini kita masukkan di bidang pendistribusian program Madiun taqwa yang berupa pelayanan dakwah.

Dana-dana yang masuk kita hitung dan pilah jenisnya, zakat 1/8 dan infaq 20%, sedangkan APBD seluruhnya boleh digunakan untuk operasional BAZNAS.

3. Dalam laporan realisasi anggaran tahun 2018 ini saya cermati ada pengeluaran biaya pengadaan alat kantor/inventaris yang selisih rencana dan realisasinya sangat berbeda jauh, kenapa begitu buk?

Jawab:

Itu karena kita membeli motor 3 unit mbak. Harga belinya sekitar 50 juta, tapi 8 juta itu kita ambilkan dari penjualan 3 motor sebelumnya.

4. Untuk rencana pengumpulan tahun 2018 ada kendala apa buk, kok selisih rencana dan realisasi pengumpulannya berbeda sekitar 250 juta?

Jawab:

Itu karena seperti yang pernah dibilang pak Kamto dulu tu loh mbak. Kalau kita gak jadi dapat dana CSR dari Bank Jatim sebesar 200 juta rupiah.